

Terungkap dalam Diskusi Publik

APBD Dinilai belum Berpihak Rakyat

MEULABOH-Berbagai kalangan di Kabupaten Aceh Barat, menilai penggunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat belum memihak rakyat. Buktinya, masih banyak sarana yang dibutuhkan masyarakat yang sifatnya mendesak tidak dibangun dan malah dana tersebut diserap untuk belanja aparat pemerintah.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik dengan tema mari kritisi dan awasi penggunaan dana APBD 2007 di sebuah cafe di Meulaboh, Sabtu (9/6). Kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa Fisip UTU, Meulaboh kerjasama USAID, LGSP, Flower Aceh,

sebuah radio swasta di Meulaboh dengan menghadirkan pembicara Dekan Fisip Said Fadlein. Hadir pada kesempatan itu, Rektor UTU Alfian Ibrahim dan Dekan Fisip Mursyidin serta sejumlah LSM lokal.

Seperti diutarakan Hasbullah (LSM GSF) seorang peserta diskusi, sebelum dibahas APBD seharusnya harus dikonsultasikan dengan rakyat. Begitu juga masyarakat harus berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan yang dianggarkan melalui dana APBD. Saran yang hampir serupa juga disampaikan Burhanto (LSM YPK), suksesnya pembangunan juga didukung dengan berpihaknya bupati

kepada rakyat. "Selama ini kami melihat, APBD masih belum berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Sementara Said Fadlein menyatakan, masyarakat harus meningkatkan pengawasan dalam pembangunan daerah melalui dana yang dianggarkan dalam APBD sehingga pembangunannya dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Begitu juga dengan pejabat dan anggota dewan agar kepentingan rakyat lebih diutamakan dari pribadi seperti seorang anggota lembaga legeslatif yang jelas-jelas merupakan perwakilan rakyat yang harus setiap saat memikirkan kepentingan masyarakat. (rz)